

# JUSTISIA

## Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke PPK Cibitung Polsek Surade Polres Sukabumi Berjalan Lancar, Sempat Ditemukan Kekurangan

Sukabumi - [SUKABUMI.JUSTISIA.CO.ID](http://SUKABUMI.JUSTISIA.CO.ID)

Nov 19, 2024 - 17:56



*Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke PPK Cibitung Polsek Surade Polres Sukabumi Berjalan Lancar, Sempat Ditemukan Kekurangan*

– Proses pendistribusian logistik pemilu di luar kotak pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah berlangsung dari Kantor KPU Kabupaten Sukabumi ke Gudang Logistik PPK Kecamatan Cibitung. Distribusi yang dilakukan pada Selasa (19/11) sekitar pukul 13.20 WIB ini melibatkan kendaraan box HINO berpelat nomor D-9788-AI, yang dikemudikan oleh Santana, dengan pengawalan ketat demi menjaga keamanan logistik.

Adapun rincian logistik yang didistribusikan meliputi:

- **Bilik suara:** 180 unit
- **Kontainer besar hasil TPS:** 4 unit
- **Kontainer kecil hasil PPK:** 2 unit
- **Logistik di luar kotak untuk TPS:** 45 set
- **Logistik di luar kotak untuk PPK:** 1 set
- **Logistik di luar kotak untuk PPS:** 6 set

Logistik tersebut diserahkan oleh Fauzi Nurdin, S.Sos, selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Pilkada Kabupaten Sukabumi, dan diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Cibitung, Giant Iswanto, S.Pd. Proses ini juga disaksikan oleh unsur Forkopimcam Cibitung dan Panwascam Cibitung, menambah transparansi dan akuntabilitas distribusi.

Namun, dari hasil pengecekan logistik, ditemukan adanya kekurangan 1 set alat tulis kantor (ATK) yang seharusnya berjumlah 45 set. Kekurangan ini terjadi pada logistik TPS 3 Desa Cidahu. Meski demikian, distribusi logistik tetap dilanjutkan ke PPK Cimanggu dan Kalibunder untuk menjaga jadwal pengiriman.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Distribusi Logistik Pemilu Nomor 1273/PP.09-SD/3202/2022 dan Surat KPU Nomor 1273/PP.09 Und/3202/2024. Pihak terkait diimbau untuk meningkatkan pengamanan logistik demi mencegah potensi gangguan dari pihak tak bertanggung jawab yang dapat mengancam kelancaran pemilu.